

RENCANA STRATEGIS REVIU I

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
2015 - 2019**



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
2016**

**RENCANA STRATEGIS REVIU I
BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH
2015-2019**

No. Publikasi : 72510.1601
Katalog BPS : 1201010.72
Ukuran Buku : 215 x 297
Jumlah Halaman : 44 Lembar

Naskah :
BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar Kulit :
BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Diterbitkan oleh :
BPS Provinsi Sulawesi Tengah

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Reviu I BPS Provinsi Sulawesi Tengah periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Provinsi Sulawesi Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu Renstra BPS. Renstra Reviu BPS Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab BPS Provinsi Sulawesi Tengah dan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi di BPS Provinsi Sulawesi Tengah.

Renstra Reviu I BPS Provinsi Sulawesi Tengah menjabarkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan teknis dan administrasi dalam mendukung kegiatan teknis dan administrasi BPS dalam kurun waktu 2015-2019. Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan masing-masing bidang di lingkup BPS Provinsi Sulawesi Tengah dan diimplementasikan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPS Provinsi Sulawesi Tengah.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan Renstra Reviu ini. Kritik dan saran untuk perbaikan Renstra ini sangat kami hargai. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amin.

Palu, 11 Juli 2016
Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah,

Faizal Anwar

RINGKASAN EKSEKUTIF

BPS Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Renstra Reviu I BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pendukung kelancaran penyelenggara kegiatan teknis dan administrasi statistik dalam melaksanakan visi dan misi BPS khususnya serta pembangunan nasional di bidang statistik pada umumnya selama 2015-2019.

Visi BPS Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana visi BPS adalah *“Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”*. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui pernyataan visi dan misi BPS tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik; dan (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2015–2019, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaannya; dan (3) kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra Reviu I BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2015–2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar _____	i
Ringkasan Eksekutif _____	ii
Daftar Isi _____	iii
Bab I Pendahuluan _____	1
1.1. Latar Belakang _____	1
1.2. Kondisi Umum _____	3
1.3. Potensi dan Permasalahan _____	4
Bab II Visi, Misi, dan Tujuan _____	8
2.1. Visi BPS _____	8
2.2. Misi BPS _____	8
2.3. Tujuan BPS Provinsi Sulawesi Tengah _____	8
2.4. Sasaran Strategis BPS Provinsi Sulawesi Tengah _____	10
Bab III Arah Kebijakan Strategis _____	12
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi _____	12
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi Sulawesi Tengah _____	14
3.3. Program dan Kegiatan _____	15
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan _____	20
4.1. Target Kinerja _____	20
4.2. Kerangka Pendanaan BPS Provinsi Sulawesi Tengah _____	24
Bab V Penutup _____	25
Daftar Tabel _____	
Tabel 1 _____	9
Tabel 2 _____	17
Tabel 3 _____	21
Tabel 4 _____	24
Tabel 5 _____	26
Tabel 5 _____	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamatkan berbagai perubahan mendasar terkait pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah (Medium-Term Expenditure Framework), penganggaran terpadu (Unified Budget), dan penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budget). Hal tersebut mensyaratkan adanya keterkaitan antara perencanaan, pendanaan, dengan kinerja, serta capaian kinerja dengan akuntabilitas organisasi.

Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan Kementerian/Lembaga. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

BPS sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Pelayanan prima, akuntabel dan transparan ini tidak akan terwujud tanpa

adanya dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, pelayanan prima yang akuntabel dan transparan dilaksanakan melalui upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan *good governance*.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), sangat menuntut dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. Untuk itu, BPS Provinsi Sulawesi Tengah perlu menyusun Renstra dalam mendukung pembangunan di bidang teknis dan administrasi statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya *good governance* dan *clean goverment* di Indonesia.

BPS Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan tugasnya selama lima tahun dituangkan dalam Renstra BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 (Reviu ke 1) yang mengacu pada Renstra BPS tahun 2015-2019. Renstra BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 (Reviu ke 1) berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan BPS 2015-2019. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan BPS Provinsi Sulawesi Tengah akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Renstra BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 (Reviu ke 1) menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan BPS Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung peksanaan pembangunan nasional di bidang

statistik selama lima tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.2. Kondisi Umum

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam lima tahun ke depan BPS Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik yang ditetapkan oleh BPS RI untuk penguatan sistem data dan informasi pembangunan yang sejalan RPJM daerah, dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan nasional.

Selama ini, BPS Provinsi Sulawesi Tengah telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Indikator sosial-ekonomi diperoleh melalui Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi, berbagai survei di bidang sosial-ekonomi

dan kependudukan. Beberapa indikator tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

BPS Provinsi Sulawesi Tengah juga telah memenuhi kebutuhan pemerintah maupun pemerintah daerah, diantaranya Pendataan Sosial Ekonomi 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008, dan Pendataan Usaha Tani 2009 untuk mendukung program-program khusus, seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan sejenisnya.

1.3. Potensi dan Permasalahan

Dalam merencanakan pembangunan di bidang statistik yang akan dilaksanakan dipandang perlu untuk memahami potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi, agar rumusan program dan kegiatan menjadi tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.3.1. Potensi yang Dimiliki

Secara kelembagaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik kepada publik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan

informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Kemajuan TIK yang pesat sangat potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Provinsi Sulawesi Tengah merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan serta pelayanan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh konsumen.

Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan pada hampir semua level pemerintahan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil.

Sejalan dengan kondisi tersebut, meskipun secara umum kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun sebagai konsumen terhadap data dan informasi statistik dalam wilayah BPS Provinsi Sulawesi Tengah dirasakan masih rendah, tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan SSN maka

penyediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas tidak dapat dihindari. Menyikapi hal ini pemerintah dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional.

1.3.2. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang prima, akuntabel dan transparan lebih bertumpu pada permasalahan internal. Permasalahan yang menonjol adalah terbatasnya SDM baik teknis maupun administrasi yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini sebagai dampak dari cepatnya pemekaran wilayah, yang juga membawa konsekuensi adanya beberapa kabupaten/kota yang sampai saat ini ada yang belum mempunyai perwakilan BPS. Selain itu, sistem administrasi yang belum terintegrasi menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki BPS belum seluruhnya dapat diperbaharui.

Hal-hal lain yang dipandang sebagai permasalahan eksternal adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Hal ini menyebabkan data yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas dan response rate yang rendah.

Selain itu, belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Salah satu kendala adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, sosialisasi

UU tersebut belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang tugas dan fungsi BPS, sehingga mereka beranggapan bahwa BPS sumber dari segala jenis data dan informasi statistik yang mereka perlukan.

Koordinasi antar instansi belum optimal, sehingga masih sering terjadi duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien.

Permasalahan penting lainnya yaitu belum optimalnya implementasi empat prinsip dasar dari sepuluh prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmi yang direkomendasikan oleh PBB, antara lain :

- i. National Statistical Offices (NSO) berhak untuk membetulkan dan mengklarifikasi apabila terjadi kekeliruan tafsir dan penyalahgunaan statistik.
- ii. Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei maupun catatan administrasi di mana NSO bertanggung jawab terhadap kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban pada responden.
- iii. Koordinasi di antara penyelenggara statistik dan NSO adalah penting untuk mencapai sistem statistik yang konsisten dan efisien.
- iv. Kerjasama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam kerangka perbaikan sistem statistik nasional di semua negara.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1. Visi BPS

Visi BPS adalah “**Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua**”

2.2. Misi BPS

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;
- b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan
- c. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

2.3. Tujuan BPS

Tujuan I: Peningkatan kualitas data statistik;

Tujuan II: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;

Tujuan III: Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, BPS Provinsi Sulawesi Tengah berperan aktif dalam pembangunan statistik yang dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia). Empat pilar reformasi birokrasi

dilakukan BPS RI dalam tempo 2015-2019, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data; (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja; dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

Guna memudahkan penilaian pencapaian kinerja, beberapa indikator dan target ditetapkan untuk setiap tujuan secara spesifik. Secara spesifik indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tujuan, Indikator Kinerja dan Target BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2015-2019

No	Tujuan		Target				
	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	90%	90%	90%	90%	90%
2.	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS	90%	90%	95%	95%	95%
3.	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	60	70	70	70	70

2.4. Sasaran Strategis BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Peningkatan kualitas data statistik” adalah :
 - 1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan indikator sasaran :
 - 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik;
 - 1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama;
 - 1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS;
 - 1.1.4. Jumlah Release Data yang tepat waktu;
 - 1.1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu; dan
 - 1.1.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu.
 - 1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement), dengan indikator sasaran :
 - 1.2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga
 - 1.2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

- 1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik”, adalah :
 - 2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data, dengan indikator sasaran :
 - 2.1.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS;
 - 2.1.2. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS;
 - 2.1.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS
3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: “Peningkatan birokrasi yang akuntabel”, adalah :
 - 3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
Dengan indikator sasaran :
 - 3.1.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
 - 3.1.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I.
 - 3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
Dengan indikator sasaran :
 - 3.2.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPS

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (*faster*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 – 2019) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015 - 2019.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.

Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut, sampai dengan tahun 2014 telah dipublikasikan beberapa indikator ekonomi dan sosial. Indikator ekonomi tersebut mencakup Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), Ekspor dan Impor, Nilai Tukar Petani, Industri, Pertambangan, Keuangan Daerah, dan berbagai indeks harga lainnya. Sedangkan indikator-indikator sosial dihasilkan melalui survei dan sensus kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa, dan sejenisnya. Semua indikator ekonomi dan sosial tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Arah kebijakan penyelenggaraan BPS Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, sebagai berikut :

- a) Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.
- b) Peningkatan respons rate.
- c) Memastikan pengendalian mutu melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik.
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat.
- e) Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS.
- f) Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik.
- g) Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN.

Sedangkan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik;

- b) Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data;
- c) Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik;
- d) Meningkatkan Customer Relationship Management;
- e) Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai;
- f) Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
- g) Mengoptimalkan penyebaran informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait;
- h) Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statistik BPS; dan
- i) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, BPS mempunyai satu Program Teknis dan tiga Program Generik. Sedangkan untuk BPS Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai satu Program Teknis dan dua Program Generik, Program Teknis adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Adapun Program Generik BPS Provinsi Sulawesi Tengah meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS.

Di lingkungan BPS Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan program dua program generik yaitu DMPTTL dan PSPA. Program DMPTTL BPS bertujuan

untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, sedangkan Program PSPA BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi.

Secara lengkap setiap kegiatan beserta indikator kinerja, target pencapaian dan alokasi anggaran yang dibutuhkan disajikan dalam Lampiran

Hubungan antara visi, misi, tujuan dan penjabarannya sampai dengan kegiatan disajikan pada tabel 2. Sedangkan Tabel 4 menunjukkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka mencapai sasaran dan capaian program selama 2015-2019.

Tabel 2. Hubungan Visi, Misi sampai dengan Program dan Kegiatan BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2015-2019

Visi (1)	Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Arah Kebijakan (5)	Strategi (6)	Program (7)	Kegiatan (8)
Pelopor data statistik terpercaya untuk semua	<p>1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;</p> <p>2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan</p> <p>3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.</p>	<p>1. Peningkatan kualitas data statistik</p> <p>2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik</p> <p>3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel</p>	<p>1. Meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, Indikator sasaran :</p> <p>1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik</p> <p>1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama</p> <p>1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS</p> <p>1.4. Jumlah Release Data yang tepat waktu</p> <p>1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu</p> <p>1.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu</p> <p>2. Meningkatnya kualitas hubungan</p>	<p>a) Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.</p> <p>b) Peningkatan respons rate.</p> <p>c) Memastikan pengendalian mutu melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik.</p> <p>d) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat.</p> <p>e) Peningkatan kemudahan dan</p>	<p>a) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik;</p> <p>b) Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data;</p> <p>c) Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik;</p> <p>d) Meningkatkan Customer Relationship Management;</p> <p>e) Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai;</p>	<p>1. PPIS</p> <p>2. DMPTTL</p> <p>3. PSPA</p>	<p>KEGIATAN 2895: BPS Provinsi (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi)</p> <p>KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)</p> <p>KEGIATAN 2891: (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi)</p>

			<p>dengan sumber data (respondent engagement), Indikator sasaran :</p> <p>2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga</p> <p>2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha</p> <p>2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha</p> <p>3. Meningkatkan kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement), Indikator sasaran :</p> <p>3.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS</p>	<p>kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS.</p> <p>f) Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik.</p> <p>g) Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi & kerjasama dalam penyelenggaraan SSN.</p>	<p>f) Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik;</p> <p>g) Mengoptimalkan penyebaran informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait;</p> <p>h) Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statistik BPS; dan</p> <p>i) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan</p>		
--	--	--	---	--	---	--	--

			<p>3.2. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS</p> <p>3.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS</p> <p>4. Meningkatnya kualitas manajemen Sumber Daya Manusia BPS</p> <p>Indikator sasaran :</p> <p>4.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu</p> <p>4..2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I</p> <p>5. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS</p> <p>Indikator sasaran :</p> <p>5.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat</p>		<p>anggaran dan pelaksanaan kegiatan</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2015 – 2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis BPS Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015 – 2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Sasaran Strategis BPS Provinsi Sulawesi Tengah Priode 2015 s.d 2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja (2019)
T.1.Peningkatan kualitas data statistik	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	IKSS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	90 %
		IKSS 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	80 %
		IKSS 1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100 %
		IKSS 1.4. Jumlah Release Data yang tepat waktu	70
		IKSS 1.5. Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu	30
		IKSS 1.6. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	2
T.2. Peningkatan pelayanan	Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>Respondent</i>)	IKSS 2.1. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan	100 %

prima hasil kegiatan statistik	<i>Engagement)</i>	pendekatan rumah tangga	
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>Respondent Engagement</i>)	IKSS 2.2. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	100 %
	SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)	IKSS 2.3. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha	100 %
		IKSS 4.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	50.000
		IKSS 4.2. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	90 %
		IKSS 4.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	90 %

4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan keempat program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).

Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan BPS Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2015 s.d 2019 dapat dilihat pada Lampiran.

4.2. Kerangka Pendanaan BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Alokasi Anggaran 2015-2019 Menurut Program

(dalam juta rupiah)

Program/Kegiatan		Alokasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	ALOKASI PROGRAM TEKNIS					
I	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	6.353,522	6.114,236	6.200,00	6.300,00	6.300,00
	- Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi	6.353,522	6.114,236	6.200,00	6.300,00	6.300,00
B	ALOKASI PROGRAM GENERIK					
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	7.231,383	8.149,945	9.000,00	10.000,00	11.000,00
	- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	7.231,383	8.149,945	9.000,00	10.000,00	11.000,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS	7.444,370	2.089,020	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi	7.444,370	2.089,020	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total		21.029,28	16,353,20	16.200,00	17.300,00	18.300,00

BAB V

PENUTUP

Renstra BPS Provinsi Sulawesi Tengah periode 2015 – 2019 (Reviu ke 1) disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan dalam Renstra BPS 2015 – 2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas.

Dalam Renstra BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2015 – 2019 (Reviu ke 1), setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2015 – 2019 (Reviu ke 1) membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

LAMPIRAN

Tabel 5. Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Pro Gram Kegia Tan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
BPS Provinsi Sulawesi Tengah						21.029,28	16,353,20	16.200,00	17.300,00	17.300,00	
	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS										
	1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	90%	90%	90%	90%	90%					
	1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	80%	80%	80%	80%	80%					
	1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.4. Jumlah Release Data yang tepat waktu	73	70	70	70	70					
	1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	41	30	30	30	30					
	1.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	10	2	0	0	0					
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)						6.353,522	6.114,236	6.200,00	6.300,00	
	2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%					

2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	100%	100%	100%	100%	100%					
2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100%	100%	100%	100%	100%					
SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)										
3.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	49.000	40.000	45.000	50.000	50.000					
3.2. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	85	85	90	90	90					
3.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	65	90	90	90	90	7.444,370	2.089,020	1.000,00	1.000,00	
SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS						7.231,383	8.149,945	9.000,00	10.000,00	1
4.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	35%	21,34%	25%	30%	35%					
4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	72	75,47	76	77	78					
SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS										
5.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektoral	60	70	70	70	70					

Jumlah publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus	1									
Jumlah publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus yang terbit tepat waktu	1									
Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Penduduk Antar Sensus	100%									
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat	2	1	2	2	2					
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu	2	1	2	2	2					
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang memiliki ISSN/ISBN	2	1	2	2	2					
Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Kesejahteraan Rakyat dengan pendekatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%					
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	1	1	1	1	1					
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1					
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang memiliki ISSN/ISBN	1	1	1	1	1					
Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%					

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100%	100%	100%	100%	100%				
Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa	13								
Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa yang tepat waktu	13								
Persentase pemasukan dokumen (response rate) Pendataan Potensi Desa				100%					
Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial	100%								
Persentase Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu	100%								
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	12	2	2	2	2				
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang terbit tepat waktu	12	2	2	2	2				
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang memiliki ISSN/ISBN	12	2	2	2	2				
Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan rumah tangga	0%	0%	0%	0%	0%				
Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan usaha	100%	100%	100%	100%	100%				

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100%	100%	100%	100%	100%				
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	1	1	1	1	1				
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1				
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN	1	1	1	1	1				
Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan rumah tangga	0%	0%	0%	0%	0%				
Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan usaha	100%	100%	100%	100%	100%				
Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100%	100%	100%	100%	100%				
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	4	4	4	4	4				
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang terbit tepat waktu	4	4	4	4	4				
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik	2	1	1	1	1				

Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang memiliki ISSN/ISBN										
Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi dengan pendekatan usaha	100%	100%	100%	100%	100%					
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi										
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu	3	3	3	3	3					
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang memiliki ISSN/ISBN	3	3	3	3	3					
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik distribusi dengan pendekatan usaha	100%	100%	100%	100%	100%					
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik distribusi dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100%	100%	100%	100%	100%					
Jumlah publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016		2	1							
Jumlah publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016 yang terbit tepat waktu		2	1							
Persentase pemasukan dokumen (response rate) Sensus Ekonomi 2016		100%	100%							
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga	3	3	3	3	3					
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	3	3	3	3	3					
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang memiliki ISSN/ISBN	1	3	3	3	3					
Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Harga	100%	100%	100%	100%	100%					

dengan pendekatan rumah tangga										
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik harga dengan pendekatan usaha	100%	100%	100%	100%	100%					
Jumlah Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup			2							
Jumlah Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup yang terbit tepat waktu			2							
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei biaya hidup			100%							
Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)			1							
Jumlah Publikasi/Laporan Survey Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) yang terbit tepat waktu			1							
Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survey Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)			100%							
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata	3	3	3	3	3					
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu	3	3	3	3	3					
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang memiliki ISSN/ISBN	3	3	3	3	3					
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan usaha	100%	100%	100%	100%	100%					
Persentase pemasukan dokumen	100%	100%	100%	100%	100%					

(response rate) survei statistik survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan non rumah tangga non usaha										
Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi	2	2	2	2	2					
Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu	2	2	2	2	2					
Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang memiliki ISSN/ISBN	2	2	2	2	2					
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca produksi dengan pendekatan usaha	100%	100%	100%	100%	100%					
Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran	1	1	1	1	1					
Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1					
Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang memiliki ISSN/ISBN	1	1	1	1	1					
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%					
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan usaha	100%	100%	100%	100%	100%					
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100%	100%	100%	100%	100%					
Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik	2	7	7	7	7					

Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik yang tebit tepat waktu	2	7	7	7	7				
Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang memiliki ISSN/ISBN	2	7	7	7	7				
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei analisis dan pengembangan statistik dengan pendekatan rumah tangga	100%	0%	100%	100%	100%				
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei analisis dan pengembangan statistik dengan pendekatan usaha	100%	100%	100%	100%	100%				

PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS						7.231,383	8.149,945	9.000,00	10.000,0
KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)						7.231,383	8.149,945	9.000,00	10.000,0
Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12				
Jumlah Laporan Dukungan Manajemen	3	4	4	4	4				
Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%				
Persentase Sarana dan Prasarana TIK dalam kondisi Baik	80%	90%	90%	90%	90%				
Persentase Sarana dan Prasarana Lainnya dalam kondisi Baik	90%	90%	90%	90%	90%				

PROGRAM 02: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							7.444,370	2.089,020	1.000,00	1.000,00
KEGIATAN 2891: (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi)							7.444,370	2.089,020	1.000,00	1.000,00
Jumlah Pengadaan kendaraan Bermotor	0	0	5	2	2					
Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan	0	0	100%	100%	100%					
Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0	1	1	1	1					
Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
Jumlah Pengadaan kebutuhan peralatan dan fasilitas	1	1	1	1	1					
Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
Jumlah pengadaan kebutuhan gedung dan bangunan yang memadai	3800 m2	600 m2	1 paket	1 paket	1 paket					
Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS	100%	100%	100%	100%	100%					
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	65%	90%	90%	90%	90%					
Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					

Tabel 6. Pendanaan Per Kegiatan

Program/Kegiatan (1)	Alokasi			
	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	
A Program Teknis (PPIS) BPS Provinsi Sulawesi Tengah	6.353.522	6.114.236	6.200.000	6.
Kegiatan 2895: (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi)	6.353.522	6.114.236	6.200.000	6.
B Program Generik (DMPTTL dan PSPA) BPS Provinsi Sulawesi Tengah	14.675.753	10.238.965	10.000.000	11.
I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya	7.231.383	8.149.945	9.000.000	10.
Kegiatan 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)	7.231.383	8.149.945	9.000.000	10.
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS	7.444.370	2.089.020	1.000.000	1.
Kegiatan 2891: (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi)	7.444.370	2.089.020	1.000.000	1.